



ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA PT BGR LOGISTIK INDONESIA CABANG SEMARANG)

Nia Setiya Ardiyani¹, Arda Raditya Tantra²

Akuntansi Perpajakan, Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, Indonesia

Info Article

Submitted : 12 Nov,2023

Revised : 5 Jan, 2024

Accepted : 31 Jan, 2024

Keywords:

PT BGR Logistik

Indonesia, E-Invoice

Abstract

Tax Services in the Java and Bali regions, especially in Central Java, there is an obligation to use an electronic tax invoice (e-Invoice) to improve the efficiency of tax administration. The purpose of making this e-Invoice is a step to avoid forms of deviation, this is an evolution of the efforts of the Directorate General of Taxes to improve the administration of Value Added Tax (VAT). The Semarang branch of the logistics company, namely PT BGR Logistik Indonesia, offering digital-based logistics service solutions with a wide network, has also implemented an e-Invoice system to make it easier to make consumer tax invoices that have made warehouse rental transactions, logistics services, and Supply Chain Management Profider. This research method uses a qualitative method, and the data source obtained from the subject of the origin of this research data uses Primary Data, data collection techniques involve observation, interviewing, and documentation while the process of qualitative data analysis begins with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. With the E-Invoice system, it can help and facilitate the creation of Value Added Tax (VAT) and also minimise errors that occur. If the system runs well, it will help the productivity of daily activities in the collection of receivables, especially knowing the collected taxes.

ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA PT BGR LOGISTIK INDONESIA CABANG SEMARANG)

Abstrak

Pelayanan Pajak di wilayah Jawa dan Bali, terutama di Jawa Tengah, diberlakukan kewajiban menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan tujuan dari pembuatan e-Faktur ini merupakan langkah untuk menghindari bentuk-bentuk penyimpangan, ini merupakan evolusi dari upaya Ditjen Pajak untuk meningkatkan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Cabang Semarang dari perusahaan logistik yaitu PT BGR Logistik Indonesia menawarkan solusi jasa logistik berbasis digital dengan jaringan yang luas juga telah menerapkan sistem e-Faktur untuk mempermudah pembuatan faktur pajak konsumen yang telah melakukan transaksi Penyewaan Gudang, Layanan Logistik, dan Supply Chain Management Profider. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan sumber data yang diperoleh dari subjek asal data penelitian ini menggunakan Data Primer, teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan Proses analisis data kualitatif dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Dengan adanya sistem E-Faktur dapat membantu serta memudahkan pembuatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga meminimalisir kesalahan yang terjadi. Apabila sistem berjalan dengan baik, maka akan membantu produktivitas kegiatan sehari-hari yang ada di kasi penagihan piutang terutama mengetahui pajak-pajak yang tertagih.

PENDAHULUAN

Menurut Saputra (2019), Rendahnya kesadaran wajib pajak yang menjadi masalah negara berkembang, hal ini juga dilatar belakangi oleh sistem perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment yang berbeda dengan sistem pemungutan pajak yang dipakai sebelumnya. Penurunan tax ratio di Indonesia dan posisinya yang berada di bawah negara berkembang lain di Asia menunjukkan tantangan dalam pengumpulan pendapatan pemerintah. Tingkat rasio pajak yang rendah mencerminkan bahwa jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia juga relatif rendah. Hal ini dapat menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan serta pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.

Reformasi birokrasi di Indonesia telah memasuki era digitalisasi dengan penerapan berbagai aplikasi dan sistem untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan. Kemajuan dunia teknologi data belum lama ini semakin memudahkan orang dalam bertugas (Dharmawan, 2023). Ndruru (2023), Mengatakan E-Faktur merujuk pada Faktur pajak yang dihasilkan melalui aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan diberikan oleh Ditjen Pajak. Faktur pajak elektronik adalah bagian dari sistem elektronik yang telah dikembangkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ini merupakan evolusi dari upaya Ditjen Pajak untuk meningkatkan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang sebelumnya melibatkan penciptaan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang juga telah menerapkan e-Faktur untuk mempermudah pembuatan faktur pajak

konsumen yang telah melakukan transaksi. Cabang Semarang dari perusahaan logistik yaitu PT BGR Logistik Indonesia menawarkan solusi jasa logistik berbasis digital dengan jaringan yang luas. Mereka menyediakan solusi terintegrasi, bersaing, handal, dan dapat dipercaya. PT BGR Logistik Indonesia, sebagai anak perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), mempertahankan konsistensi dalam memberikan pelayanan unggul dan pengalaman logistik yang superior melalui layanan digital kepada pelanggan. Beberapa layanan yang ditawarkan mencakup:

1. Jasa Penyewaan Gudang (Warehousing)
2. Layanan Logistik (Logistics Services)
3. Penyedia Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management Profider)

Penerapan e-Faktur sudah dilakukan sejak lama dikarenakan peningkatan transaksi dan untuk memudahkan karyawan untuk menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

E-faktur pajak sangat membantu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dengan mengurangi proses manual. Proses ini mengurangi potensi kesalahan dan penipuan dalam perhitungan dan pelaporan PPN e-faktur juga memungkinkan otoritas pajak untuk memantau dan memeriksa transaksi secara realtime hal ini menciptakan tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam pengumpulan PPN dengan e-faktur, otoritas pajak dapat lebih efektif mengendalikan penghindaran pajak, karena mereka memiliki akses langsung ke data transaksi perusahaan.

PENGEMBANGAN TEORI

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)

Menurut Saputra (2019), Teori perilaku terencana memaparkan tiga komponen yang dapat mempengaruhi timbulnya suatu niat,

yang kemudian akan berkontribusi pada terbentuknya perilaku individu. Ketiga komponen tersebut merupakan sikap (*atti-tudes*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia, teori ini juga disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa semakin berkembangnya zaman, teknologi informasi semakin canggih maka individu diwajibkan untuk mengikuti perkembangan dengan contoh ketika pembayaran pajak yang dulunya dilakukan secara manual sekarang telah menggunakan sistem yang akan mempercepat dan mempermudah untuk menghitung berapa pajak yang harus dilaporkan serta dibayarkan. Theory of Planned Behavior (Teori Prilaku Terencana) juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dibentuk oleh keyakinan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak yang meliputi segala hal yang diketahui oleh wajib pajak, diyakini dan dialami wajib pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Ngadiman (2019) Pajak, yaitu kontribusi yang bersifat wajib bagi warga negara, sifat pajak adalah memaksa untuk setiap warga negara, wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung, dan pajak berdasarkan pada undang - undang.

Menurut Kardiyati & Karim, (2020) Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sendiri adalah nilai tambah yang dikenakan atas setiap penjualan barang atau jasa.

Menurut Kusumawati & Jati, (2022) E-faktur merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan

dan penyerahan laporan SPT PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dalam kehidupan sehari-hari individu ataupun kelompok terbiasa melakukan transaksi penjualan ataupun pembelian atas transaksi tersebut maka akan dikenakan salah satu pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seorang atau kelompok Kena Pajak yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak diwajibkan untuk melaporkan atau membayar faktur pajak. Faktur Pajak tersebut berperan sebagai bukti pungutan pajak atas barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dalam Undang - Undang No. 42 Tahun 2009 di jelaskan jika pembuatan faktur pajak tidak bisa dilakukan dengan semena-mena.

E-Faktur merupakan sistem baru yang digunakan untuk pembuatan faktur pajak, sebelum adanya sistem pajak faktur pajak banyak orang dapat membuat faktur pajak dengan bebas dan menerbitkan faktur tersebut yang biasa kita sebut dengan faktur pajak palsu atau fiktif. Pembuatan faktur pajak secara manual juga dapat mengalami kesalahan catat dan juga kesalahan hitung dengan adanya sistem pajak baru mempermudah seorang atau kelompok dalam pembuatan faktur. Direktorat Jendral Pajak telah merilis atau menyediakan sistem khusus untuk pembuatan faktur pajak yang secara otomatis dapat langsung terhubung untuk pembuatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk itu keamanan-nya sudah terjamin dan tidak perlu dikhawatirkan.

Aplikasi E-Faktur dibuat oleh DJP sebagai bentuk kemajuan teknologi di bidang perpajakan serta mempermudah pengawasan DJP dalam administrasi yang dilakukan oleh wajib pajak seorang ataupun kelompok. Sistem E-Faktur ini diberlakukan dengan tujuan untuk memudahkan pengecekan transaksi, menghindari Fakatur Pajak yang tidak valid, keamanan data terjamin, menghemat biaya dan waktu, serta

memudahkan dalam pembuatan. Dengan adanya E-Faktur ini memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi wajib pajak seorang ataupun kelompok dalam pembuatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Aplikasi E-Faktur ini juga memiliki beberapa kendala seperti server eror dari Perusahaan, server e-faktur dari DJP juga sering mengalami perbaikan yang menyebabkan penginputan e-faktur menjadi memerlukan waktu yang lama, dan ketika data telah di upload secara otomatis tersimpan dan tidak dapat diganti atau tidak dapat diubah.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian yang akan dilakukan di PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang akan membuktikan bagaimana penerapan e-Faktur dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak serta bagaimana setelah pengusaha kena pajak yang melaksanakan kewajiban pada saat sebelum penerapan e-Faktur dan setelah penerapan e-Faktur dan Adakah hambatan yang dihadapi dalam proses pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak menggunakan sistem e-Faktur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang mana penulis menekankan analisis dan deskripsi dalam menggali pemahaman mendalam. Metode penelitian kualitatif menjadi landasan utama, memungkinkan penulis untuk menjelajahi dan merinci aspek-aspek yang kompleks dan kontekstual. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif menurut (Syafii, 2022) terkait dengan penerapan E-Faktur di PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang. Dalam penelitian kualitatif, penekanan pada perspektif subjek menjadi lebih dominan, sementara landasan teori digunakan sebagai panduan untuk memahami fakta-fakta yang ditemui di lapangan. Tujuan

metode penelitian kualitatif adalah menjelaskan fenomena dengan mendalam, mengumpulkan data sedalam-dalamnya, dan meneliti makna substansial dari fenomena tersebut. Metode ini menitikberatkan pada observasi fenomena dan eksplorasi makna di baliknya. Analisis dalam penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Penelitian ini fokus pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta interaksi di antara elemen-elemen tersebut untuk memahami peristiwa, perilaku, atau fenomena yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di PT BGR Logistik Indonesia, sebuah perusahaan logistik yang berkegiatan di Cabang Semarang, berlokasi di Jalan Merak No. 8, Tj. Mas, Wilayah Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174.

Sumber Data yang diperoleh dari subjek asal data penelitian ini menggunakan Data Primer: Menurut (Sugiyono, 2018) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dimana sumber atau informan memberikan informasi secara langsung dan jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti dalam merumuskan permasalahan, menganalisis masalah, menyusun solusi, mengimplementasikan solusi, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan dari solusi bagi penelitian. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan narasumber. Data primer ini didapatkan melalui pernyataan yang diberikan oleh Kasie Penagihan Piutang dan Staf Penagihan Piutang di PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang.

Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi menurut (Sugiyono, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung, memahami perspektif subjek, dan mengumpulkan data yang mendalam terkait Analisis Penerapan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,

khususnya dalam pembuatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang.

Kegiatan analisis data kualitatif dapat dilakukan ketika peneliti dengan mengumpulkan data penelitian, ketika peneliti telah selesai mengumpulkan data penelitian, dan pada saat peneliti telah menganalisis jawaban informasi yang telah diwawancarai menurut (Sugiyono, 2018).

Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu yaitu wawancara, pengamatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi, dan yang terakhir adalah penafsiran data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merespons tren digitalisasi dan transformasi digital dalam bisnis. E-faktur menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi. Dengan menerapkan e-faktur, pemerintah dan pembisnis dapat merasakan manfaat yang signifikan dalam hal efisiensi, keakuratan, dan kepatuhan dalam lingkungan perpajakan yang terus berubah - ubah dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak PPN. Tingkat kepatuhan pelanggan mengacu pada sejauh mana pelanggan mematuhi atau memenuhi persyaratan, kebijakan, atau harapan yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan. Tingkat kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana pelanggan tetap setia dan mentaati aturan atau prosedur yang berlaku dalam interaksi mereka dengan bisnis atau organisasi tertentu. Kepatuhan pelanggan dapat diukur melalui sejumlah indikator, tetapi tidak terbatas pada kesetiaan, retensi pelanggan, dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang mereka terima. Mengenai bagaimana ketepatan waktu dalam

melakukan pembayaran transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi di PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang disampaikan oleh informan A-1 selaku kasi penagihan piutang ia menyatakan bahwa:

“Harus, soalnya ini berkaitan dengan nanti kalau kita tidak meaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tepat waktu nanti untuk permintaan spt sama ino-nya kita susah padahal ino-nya itu sama spt di jadikan dasar untuk penagihan invoice ke customer makanya kita harus tertib pajak”.

Selanjutnya informan A-2 selaku staf kasi penagihan piutang juga menjelaskan mengenai bagaimana ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi di PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang ia menyatakan bahwa:

“Untuk penyetoran ppn itu dijadikan untuk penerbitan faktur pajak untuk pembayaran sendiri akan dilakukan kantor pusat.”

Menurut pernyataan informan A-1 dan A-2 dapat disimpulkan bahwa sebaiknya harus tepat waktu, jika tidak dibayarkan tepat waktu maka akan membuat PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan invoice ke customer dan untuk penyetoran dilakukan oleh kantor pusat.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan. Ini melibatkan penyampaian laporan pajak tepat waktu, pembayaran pajak yang seharusnya, dan mengikuti prosedur perpajakan yang berlaku sesuai hukum. Pelanggaran kepatuhan dapat mengakibatkan sanksi atau konsekuensi hukum. Mengenai bagaimana kepatuhan wajib pajak disampaikan oleh informan A-1 selaku kasi penagihan piutang ia menyatakan bahwa:

“Ada kalau untuk teknisnya, terjadi perbedaan karena kita di bawah perlindungan hukum ya mbak, setelah adanya sistem ini kan jadi lebih patuh wajib pajak dalam pembayarannya”.

Selanjutnya informan A-2 selaku staf kasi

penagihan piutang juga menjelaskan mengenai bagaimana kepatuhan wajib pajak ia menyatakan bahwa:

“Ada mbak walupun sedikit, karena nantinya jika wajib pajak telat atau tidak membayar kantor pusat akan melakukan tindakan atau proses hukum akan di tempuh”.

Menurut pernyataan informan A-1 dan A-2 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang relevan dikarenakan terdapat beberapa sanksi jika wajib pajak telat atau bahkan tidak membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi wajib pajak secara tidak langsung akan tepat waktu dalam pembayarannya.

Hambatan dalam e-faktur mengacu pada hambatan atau masalah yang mungkin dihadapi selama penerapan atau penggunaan sistem tersebut. Beberapa hambatan yang mungkin timbul melibatkan aspek teknis, regulasi, atau penerimaan pengguna. Integrasi e-faktur dengan sistem lain yang telah ada di perusahaan dapat menjadi kompleks dan menyulitkan jika tidak dilakukan dengan baik. Beberapa organisasi mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan dari proses manual ke proses elektronik, yang dapat menyulitkan adopsi e-faktur. Mengenai bagaimana hambatan yang terjadi dalam pengoprasionalan E-Faktur disampaikan oleh informan A-1 selaku kasi penagihan piutang ia menyatakan bahwa:

“Selama ini tidak menemukan kendala yang berarti ya mbak, karena contohnya kalau kita mau memasukkan pph 23 itu cukup tinggal klik klik asal sesuai dengan fakturnya udah langsung bisa di submit tetapi kadang kendala muncul saat internet trouble dan pada saat sistem dari e-faktur sedang dalam perbaikan atau pembaruan”.

Selanjutnya informan A-2 selaku staf kasi penagihan piutang juga menjelaskan mengenai bagaimana kendala yang terjadi dalam pengoprasionalan E-Faktur ia menyatakan bahwa:

“Untuk penggunaan E-Faktur sendiri cukup memudahkan ya tinggal kita memasukkan perusahaan tujuan atau customer kita ya dan terus ngeinput nilai-nilai yang dikenakan pajak atau dpp nya terus kita input juga nilai dari pajak tersebut memudahkan jadi tidak

menyusahkan”.

Menurut pernyataan informan A-1 dan A-2 dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini masih belum ada kendala yang berarti dan dengan adanya sistem E-Faktur sangat memudahkan karyawan dalam pengoprasionalan sehari-hari tetapi kadang kendala muncul saat internet trouble dan pada saat sistem dari e-faktur sedang dalam perbaikan atau pembaruan.

KESIMPULAN

Tingkat kepatuhan pelanggan mengacu pada sejauh mana pelanggan mematuhi atau memenuhi persyaratan, kebijakan, atau harapan yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan dapat disimpulkan bahwa sebaiknya harus tepat waktu, jika tidak dibayarkan tepat waktu maka akan membuat PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan invoice ke customer dan untuk penyetoran dilakukan oleh kantor pusat. Terdapat perbedaan yang relevan dikarenakan terdapat beberapa sanksi jika wajib pajak telat atau bahkan tidak membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi wajib pajak secara tidak langsung akan tepat waktu dalam pembayarannya. Untuk saat ini masih belum ada kendala yang berarti dan dengan adanya sistem E-Faktur sangat memudahkan karyawan dalam pengoprasionalan sehari-hari tetapi kadang kendala muncul saat internet trouble dan pada saat sistem dari e-faktur sedang dalam perbaikan atau pembaruan.

SARAN

Setelah dilakukan wawancara kepada para informan terkait, diberikan saran yang mungkin dipakai oleh PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang untuk dapat memperbaiki lagi sistem E-Faktur dalam pengoprasionalan sehari-hari. Berikut adalah beberapa saran yang relevan:

1. Bagi Perusahaan

Peneliti berharap agar PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang dapat memperkuat dan mengoptimalkan penerapan E-faktur dalam operasional sehari-hari perusahaan. Dengan demikian, diharapkan efisiensi

proses keuangan dapat ditingkatkan, memberikan manfaat lebih lanjut bagi kelancaran aktivitas perusahaan dan kesesuaian dengan regulasi perpajakan yang terus berkembang. Langkah-langkah strategis dan peningkatan teknologi informasi yang cermat dapat menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan ini, sambil tetap memastikan keamanan dan kepatuhan data secara menyeluruh.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dalam pandangan peneliti, diharapkan penelitian yang mendatang dapat melibatkan eksplorasi yang lebih luas dan mendalam, serta pengetahuan yang lebih besar. Pengembangan kerangka kerja yang lebih luas, Selain itu, peneliti diharapkan dapat mengeksplorasi hubungan dan dampak potensial yang terlibat dengan lebih mendalam, sehingga hasil penelitian memiliki relevansi yang lebih luas dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita dalam bidang ini.

3. Bagi Wajib Pajak

Peneliti berharap wajib pajak agar dapat terus meningkatkan ketaatan dalam membayarkan pajak tepat waktu, menciptakan stabilitas dan keandalan dalam sistem perpajakan. Langkah ini tidak hanya akan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional, tetapi juga akan memberikan kepastian kepada

wajib pajak mengenai kewajiban pajak mereka. Selain itu, ketaatan waktu dalam membayar pajak dapat membantu mencegah potensi sanksi atau denda yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran, menjaga reputasi keuangan perusahaan, dan memberikan kontribusi positif terhadap citra bisnis secara keseluruhan. Melalui kedisiplinan ini, diharapkan dapat terwujud iklim perpajakan yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmawan, A.H. 2023. Faktor penyebab pembatalan faktur pajak. 5(9): 3560–3569.
- Kardiyati, E.N. & Karim, A. 2020. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kpp Cirebon Tahun 2016–2018). *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 17(2): 87.
- Kusumawati, I.G.A.P. & Jati, I.K. 2022. Penerapan Sistem E-Faktur dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10): 3128.
- Ndruru, D. 2023. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERAPAN E-FAKTUR PPN GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI CV. VALERIE MITRA KENCANA. 11(4): 11–20.
- Ngadiman, E.D. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2): 355.
- Saputra, H. 2019. Analisa Kepatuhan Pajak

Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1): 47.

Sugiyono 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Alfabeta Bandung*.

Syafii, M. 2022. Metode Penelitian Kualitatif.